

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Indonesia

Moraulina Marsella Simarmata

Bastari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

Email: marsella100392@gmail.com

Abstract

PPN (Value-Added Tax) and PPnBM (Luxury Goods Sales Tax) are kind of taxes recognized in Indonesia, and are classified into indirect tax which are imposed to the consumption in every level of production and distribution. As the taxes on consumption, PPN and PPnBM are highly dependent on the general economic condition. The indicators of macro economy may have influence on the revenues of PPN and PPnBM every year, and so is the amount of PKP (Taxable Entrepreneur) as PPN Collector according to the prevailing PPN Law. Therefore, the objective of the research was to find out how the amount of PKP, PDB, export value, import value, inflation, consumption expense, population and SBI interest rates influenced the revenues of PPN and PPnBM in Indonesia from 1986 until 2015. Ordinary Least Square method was applied for the analysis with multiple linear regression equation. The results showed that the amount of PKP, PDB, export value, import value, inflation, consumption expense, population and SBI interest rates simultaneously had a significant influence on the revenues of PPN and PPnBM in Indonesia. Partially, the amount of PKP, PDB, Export value, import value, consumption and population had positive influence on the revenues of PPN and PPnBM, whereas inflation and SBI interest rates had negative influence on the revenues of PPN and PPnBM in Indonesia..

Keywords: Amount of PKP, PDB, Export Value, Import Value, Inflation, Consumption, Population, SBI Interest Rates, Revenues of PPN and PPnBM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi di setiap Negara karena pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang terbesar. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tolak ukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Peran pemerintah sebagai stabilisator perekonomian dapat dijalankan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dalam perekonomian. Salah satu kebijakan yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian perekonomian adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam hal penerimaan pemerintah mempunyai instrumen utama yaitu perpajakan. Penerimaan pajak memiliki peranan yang strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah. Pajak disamping sebagai sumber penerimaan utama negara (budgetary), juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (regulatory) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (Wibowo 2000).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang bersifat tidak langsung dan dikenakan terhadap konsumsi pada setiap tingkatan produksi atau distribusi. Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir. (Untung Sukardji, 2006). Dan PPnBM yang dikenakan atas barang impor.

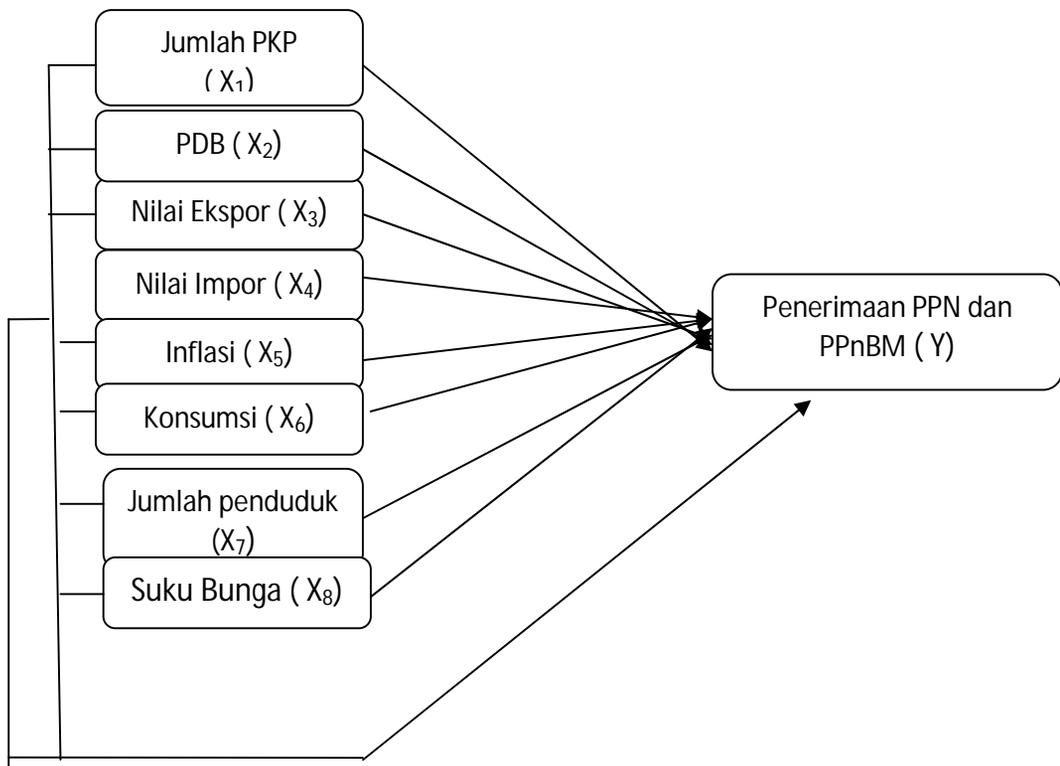
Sebelum PPN diberlakukan tahun 1984, di Indonesia diberlakukan Undang-undang Pajak Penjualan (PPN) Tahun 1951 yang merupakan warisan kolonial Belanda. Namun keberadaan Pajak Penjualan (PPN) ini dirasakan masih memiliki beberapa kekurangan maka dilakukanlah reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1984 dengan dikeluarkannya Undang-undang PPN yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (Wibowo, 2000).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (2) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (3) Untuk menganalisis pengaruh nilai ekspor terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (4) Untuk menganalisis pengaruh nilai impor terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (5) Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (6) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran konsumsi berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (7) Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (8) Untuk menganalisis pengaruh suku bunga SBI terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia; (9) Untuk menganalisis pengaruh jumlah PKP, PDB, Nilai Ekspor, Nilai Impor, inflasi, pengeluaran konsumsi, jumlah penduduk dan suku bunga secara simultan mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Dari kerangka konseptual di bawah, dapat dilihat bahwa peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh variabel independen yaitu PKP (X_1), PDB(X_2), Nilai ekspor(X_3), Nilai impor(X_4), inflasi(X_5), Pengeluaran Konsumsi (X_6) dan Jumlah Penduduk (X_7), dan Suku bunga (X_8) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPN dan PPnBM di Indonesia.

Pada penulisan penelitian ini, penulis menjelaskan variabel-variabel yang saling mempengaruhi dalam bentuk kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah PKP, PDB, nilai ekspor, nilai impor, inflasi, pengeluaran konsumsi, jumlah penduduk dan suku bunga yang ada di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1986 – 2015.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data berkala (*time series*). Data yang digunakan adalah data tahunan dalam kurun waktu tahun 1986 – 2015 (30 tahun). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian, jurnal-jurnal, karya ilmiah, website yang memiliki kumpulan data yang dibutuhkan seperti website Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia serta penelitian-penelitian sebelumnya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (variabel dependen), dengan variabel independen sebagai

indikator meliputi data PKP (X_1), PDB(X_2), nilai ekspor(X_3), nilai impor(X_4), inflasi(X_5), pengeluaran konsumsi (X_6), jumlah penduduk (X_7) dan Suku bunga (X_8).

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (Multiple Linier Regression Methode) dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS) menggunakan bantuan software analisis data kuantitatif, *Eviews 7*. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 2003).

Bentuk umum dari fungsi Penerimaan PPN dan PPnBM sebagai berikut, dengan Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + e \dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPN dan PPnBM (miliar rupiah)

X_1 = Jumlah PKP (satuan/unit)

X_2 = PDB (miliar rupiah)

X_3 = Nilai Ekspor (miliar rupiah)

X_4 = Nilai Impor (miliar rupiah)

X_5 = Inflasi (%)

X_6 = Konsumsi (miliar rupiah)

X_7 = Jumlah penduduk (satuan/unit)

X_8 = Suku bunga (%)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7 \beta_8$ = Koefisien regresi

e = Kesalahan gangguan

atau dalam bentuk transformasi *second difference* :

$$DY = D\alpha + \beta_1 DX_1 + \beta_2 DX_2 + \beta_3 DX_3 + \beta_4 DX_4 + \beta_5 DX_5 + \beta_6 DX_6 + \beta_7 DX_7 + \beta_8 X_8 + e \dots(2)$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPN dan PPnBM (miliar rupiah)

X_1 = Jumlah PKP (satuan/unit)

X_2 = PDB (miliar rupiah)

X_3 = Nilai Ekspor (miliar rupiah)

- X_4 = Nilai Impor (miliar rupiah)
- X_5 = Inflasi (%)
- X_6 = Konsumsi (miliar rupiah)
- X_7 = Jumlah penduduk (satuan/unit)
- X_8 = Suku bunga (%)
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 \beta_7 \beta_8$ = Koefisien regresi
- e = Kesalahan gangguan

Menurut Arief Daryanto dan Yundy Hafizrianda (2010:227) Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas maka persamaan regresi dengan data yang tidak normal setelah di log, harus dibuat dengan model *second difference*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model fungsi Penerimaan PPN dan PPnBM yang digunakan sebagai berikut:

$$DY = D\alpha + \beta_1DX_{1+} + \beta_2DX_{2+} + \beta_3DX_{3+} + \beta_4DX_{4+} + \beta_5DX_{5+} + \beta_6DX_{6+} + \beta_7DX_{7+} + \beta_8DX_{8+} + e \dots(1)$$

Tabel 1. Jumlah PKP, PDB, Nilai Ekspor, Nilai Impor, Inflasi, Konsumsi, Jumlah .Penduduk, Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM

Variabel	Koefisien	Invers.Second .Difference	Prob. t	Keterangan
Konstanta	165914.6	4849,349	0,087	Observasi (n) 30
X1	0,002	0,0008	0,899	
X2	-0,017	36,563	0,887	
X3	-0,007	0,026	0,208	
X4	0,733	0,528	0,022	
X5	-136,841	-0,067	0,008	
X6	0,082	0,042	0,179	
X7	-0,001	0,138	0,061	
X8	-137,173	-478,240	0,034	

R² = 0,686 Prob. F = 0,001

Sumber: data diolah

Berdasarkan data sekunder diatas, untuk melihat pengaruh variabel Jumlah PKP, PDB, Nilai Ekspor, Nilai Impor, Inflasi, Konsumsi, Jumlah Penduduk, Suku Bunga terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM dapat dianalisis koefisien statistik dari masing-masing variabel. Koefisien statistik dari masing-masing variabel independen dapat dihitung dengan bantuan komputer melalui program *Eviews 7* dengan hasil sebagai berikut diatas.

Berdasarkan hasil model estimasi fungsi Penerimaan PPN dan PPnBM yang disajikan pada tabel 1. diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4849,349 + 0,0008 X_1 + 36,563 X_2 + 0,026 X_3 + 0,528 X_4 - 0,067 X_5 + 0,042 X_6 + 0,138 X_7 - 478,240 X_8 \dots\dots\dots(2)$$

Analisis hasil model estimasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Secara Parsial

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa koefisien konstanta adalah **4849,349**. Koefisien ini memberi makna bahwa dalam keadaan tetap atau tidak ada perubahan pada variabel Jumlah PKP (**X₁**), PDB (**X₂**), Nilai Ekspor (**X₃**), Nilai Impor (**X₄**), Inflasi (**X₅**), Konsumsi (**X₆**), Jumlah Penduduk (**X₇**), Suku Bunga (**X₈**) maka nilai Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) tetap sebesar 4849,349 miliar rupiah.

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien Jumlah PKP hasil empiris sebesar **0,0008**. Koefisien empiris variabel Jumlah PKP menunjukkan pengaruh yang positif yang memberi makna bahwa apabila Jumlah PKP bertambah sebesar satu miliar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,0008 miliar rupiah. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien PDB hasil empiris sebesar **36,563**. Koefisien empiris variabel PDB menunjukkan pengaruh yang positif yang memberi makna bahwa apabila PDB bertambah sebesar satu miliar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 36,563 miliar rupiah.

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien Nilai Ekspor hasil empiris sebesar **0,026**. Koefisien empiris variabel Nilai Ekspor menunjukkan pengaruh yang positif yang memberi makna bahwa apabila Nilai Ekspor bertambah sebesar satu miliar rupiah per tahun,

maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,026 miliar rupiah.

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien hasil empiris sebesar **0,528**. Koefisien empiris variabel Nilai Impor menunjukkan pengaruh yang positif yang memberi makna bahwa apabila Nilai Impor bertambah sebesar satu miliar rupiah per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,528 miliar rupiah.

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien hasil empiris sebesar - **0,067**. Koefisien empiris variabel Inflasi menunjukkan pengaruh yang negatif yang memberi makna bahwa apabila Inflasi bertambah sebesar satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,067 miliar rupiah. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien hasil empiris sebesar **0,042**. Koefisien empiris variabel Konsumsi menunjukkan pengaruh yang positif yang memberi makna bahwa apabila Konsumsi bertambah sebesar satu miliar per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,042 miliar rupiah.

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien hasil empiris sebesar **0,138**. Koefisien empiris variabel Jumlah Penduduk menunjukkan pengaruh yang positif yang memberi makna bahwa apabila Jumlah Penduduk bertambah sebesar satu jiwa per tahun, maka akan menambah Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 0,138 miliar rupiah. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa koefisien hasil empiris sebesar - **478,240**. Koefisien empiris variabel Suku Bunga menunjukkan pengaruh yang negatif yang memberi makna bahwa apabila Suku Bunga bertambah sebesar satu persen per tahun, maka akan mengurangi Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 478,240 miliar rupiah.

2. Pengaruh Variabel Secara Serentak

Berdasarkan hasil model estimasi pada Tabel 1. diketahui bahwa nilai prob. F $0,001 < 0,05$. Artinya semua variabel bebas, yaitu variabel Jumlah PKP (**X₁**), PDB (**X₂**), Nilai Ekspor (**X₃**), Nilai Impor (**X₄**), Inflasi (**X₅**), Konsumsi (**X₆**), Jumlah Penduduk (**X₇**), Suku Bunga (**X₈**) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM pada tingkat kesalahan 5%.

3. Model Empiris

Model statistik yang dibangun perlu diuji untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji model estimasi dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2) dengan keputusan:

- o Bagus apabila $R^2 > 0,90$
- o Kurang bagus apabila $50 < R^2 < 0,90$
- o Tidak bagus apabila $0 < R^2 < 0,90$

Berdasarkan Tabel 1., hasil model empiris menunjukkan R^2 sebesar 0,686 berada di antara $50 < R^2 < 0,90$. Hal ini memberikan makna bahwa model empiris yang dibangun tentang Penerimaan PPN dan PPnBM yang ditentukan oleh Jumlah PKP (X_1), PDB (X_2), Nilai Ekspor (X_3), Nilai Impor (X_4), Inflasi (X_5), Konsumsi (X_6), Jumlah Penduduk (X_7), Suku Bunga (X_8) adalah kurang bagus karena $R^2 = 0,686 < 0,90$.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,686 memberi informasi bahwa secara bersama-sama variabel Jumlah PKP (X_1), PDB (X_2), Nilai Ekspor (X_3), Nilai Impor (X_4), Inflasi (X_5), Konsumsi (X_6), Jumlah Penduduk (X_7), Suku Bunga (X_8) mampu memberikan variasi variabel Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 68,6 %, sedangkan sisanya sebesar 31,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan pada model estimasi yang dibangun.

4. Uji Kesesuaian (Goodness Of Fit)

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 (R Square) sebesar 0,686 atau 68,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen Jumlah PKP (X_1), PDB (X_2), Nilai Ekspor (X_3), Nilai Impor (X_4), Inflasi (X_5), Konsumsi (X_6), Jumlah Penduduk (X_7), Suku Bunga (X_8) mampu memberikan variasi variabel (Y) Penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 68,6 %,.. Sedangkan sisanya sebesar 31,4 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan *views 7*, Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau

negatif dan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas maka persamaan regresi harus dibuat dengan model *second difference*. Untuk alasan pemilihan model logaritma natural adalah sebagai berikut :
 (a) Menghindari adanya heterokedastisitas; (b) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas; (c) Mendekatkan skala data. Berdasarkan hasil model estimasi fungsi Penerimaan PPN dan PPNBM yang disajikan pada tabel 1. diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4849,349 + 0,0008 X_1 + 36,563 X_2 + 0,026 X_3 + 0,528 X_4 - 0,067 X_5 + 0,042X_6 + 0,138 X_7 - 478,240 X_8 \dots\dots(3)$$

Tabel 2. Hasil Koefisien Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: DY				
Method: Least Squares				
Date: 07/07/17 Time: 15:22				
Sample (adjusted): 1988 2015				
Included observations: 28 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4849.349	2688.915	1.803460	0.0872
DX1	0.000819	0.006398	0.127991	0.8995
DX2	36.56341	255.0455	0.143360	0.8875
DX3	0.026635	0.020435	1.303391	0.2080
DX4	0.528341	0.211888	2.493489	0.0220
DX5	-0.067040	0.022778	-2.943200	0.0083
DX6	0.042712	0.030629	1.394490	0.1793
DX7	0.138541	0.069566	1.991524	0.0610
DX8	-478.2404	210.0866	-2.276397	0.0346
R-squared	0.686334	Mean dependent var	1778.818	
Adjusted R-squared	0.554264	S.D. dependent var	18779.23	
S.E. of regression	12537.67	Akaike info criterion	21.96595	
Sum squared resid	2.99E+09	Schwarz criterion	22.39416	
Log likelihood	-298.5234	Hannan-Quinn criter.	22.09686	
F-statistic	5.196743	Durbin-Watson stat	2.012054	
Prob(F-statistic)	0.001528			

Sumber: Hasil Data Diolah

Berdasarkan hasil model estimasi fungsi Penerimaan PPN dan PPnBM yang disajikan pada tabel 2. diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = 4849,349 + 0,0008 X_1 + 36,563 X_2 + 0,026 X_3 + 0,528 X_4 - 0,067 X_5 + 0,042X_6 + 0,138 X_7 - 478,240 X_8 \dots\dots\dots(4)$$

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah PKP (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
2. PDB (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
3. Nilai Ekspor (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
4. Nilai Impor (X_4) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
5. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
6. Konsumsi (X_6) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
7. Jumlah penduduk (X_7) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.
8. Suku bunga (X_8) memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia .
9. Jumlah PKP (**X_1**), PDB (**X_2**), Nilai Ekspor (**X_3**), Nilai Impor (**X_4**) , Inflasi (**X_5**), Konsumsi (**X_6**),Jumlah Penduduk (**X_7**), dan Suku Bunga (**X_8**) secara bersama-sama atau secara Simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN dan PPnBM (Y) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Gujarati, Damodar, (2003). *Ekonomitrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga: Jakarta.

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan: Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo,dan Ilyas 2000. *Perpajakan Indonesia 1 & 2*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Wibowo,Tri. 2000. Sampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal KIPAS*. Vol. 2 (24), hal. 32-39.